

Peran Organisasi Filantropi Internasional dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok – Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan *LombokCare*)

Baiq Radikawati¹, Syaiful Anam¹, Y.A. Wahyudin¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

baigradikaawati@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the role of LombokCare Foundation in helping children with disabilities in Lombok Island, NTB Province to obtain their rights. People with disabilities in Lombok Island often face limitations in accessing education, health, discrimination and on average, they came from underprivileged families. This research is qualitative, which uses both primary data (direct observation and interview) and secondary data (book, journal, report, article and data from the internet). The results shows that LombokCare Foundation has done its role as international philanthropy organization in providing free education, rehabilitation and other social programs to underprivileged children with disabilities in Lombok Island in partnership with other organizations abroad. These children have experienced many developments in terms of reading, writing, moving, and creating creativity, so that their role is expected to help the development of Lombok Island, NTB Province region to support the realization of Sustainable Development Goals.

Keywords: *Disability, Education, LombokCare Foundation, Philanthropy, Sustainable Development.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari Yayasan *LombokCare* dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperoleh hak-haknya. Penyandang disabilitas di Pulau Lombok seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, diskriminasi dan rata-rata mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer (observasi dan wawancara langsung) serta data sekunder (buku, jurnal, laporan, artikel, dan data dari internet). Hasil penelitian menunjukkan Yayasan *LombokCare* telah melakukan perannya sebagai organisasi filantropi internasional melalui pelayanan pendidikan, rehabilitasi dan program sosial lainnya secara gratis yang diberikan kepada anak-anak disabilitas yang kurang mampu di Pulau Lombok dengan melakukan kemitraan bersama organisasi lainnya di luar negeri. Anak-anak tersebut telah banyak mengalami perkembangan dalam hal membaca, menulis, bergerak, dan membuat kreativitas sehingga peran mereka diharapkan dapat membantu pembangunan daerah Pulau Lombok, Provinsi NTB untuk mendukung dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kata Kunci: *Disabilitas, Filantropi, Pembangunan Berkelanjutan, Pendidikan, Yayasan LombokCare.*

PENDAHULUAN

Hubungan internasional saat ini sudah mengalami perkembangan tidak lagi mencakup hubungan antar aktor negara namun juga aktor non negara yang dianggap berpengaruh besar seperti organisasi internasional, organisasi non pemerintah termasuk juga individu. Isu yang muncul juga kini tidak hanya terpaku pada isu tradisional seperti perang-damai atau konflik tapi menjadi lebih beragam seperti isu mengenai pendidikan, kemiskinan, hak asasi dan isu lainnya. Hal ini memunculkan adanya bentuk kerjasama dari berbagai aktor dalam dunia internasional. Dengan adanya aktor non negara dalam hubungan internasional menyebabkan peran mereka dibutuhkan untuk ikut dalam permasalahan internasional. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kemunculan mereka salah satunya dikarenakan adanya permasalahan terkait isu-isu non tradisional atau isu *low politic* yang telah mempengaruhi berlangsungnya proses hubungan internasional seperti isu mengenai disabilitas dalam ruang lingkup internasional. Isu disabilitas saat ini telah menjadi isu global yang perlu mendapat perhatian dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan disabilitas sudah menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) sejak kemunculan berbagai dokumen internasional mengenai isu disabilitas. Dimulai dari Program Aksi Dunia Mengenai Orang Cacat (1982), aturan standar tentang kesetaraan peluang tentang *People With Disabilities* (1993) hingga *Convention on the Rights People with Disabilities* (CRPD) pada tahun 2006 (Radiani, 2018, p. 14). Walaupun berbagai peraturan mengenai hak-hak disabilitas telah diberlakukan, namun hal ini terkadang tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di setiap negara.

Fakta global menyatakan dari jumlah penduduk di dunia sekitar 15% merupakan penyandang disabilitas dan termasuk kelompok minoritas terbesar di dunia. Bahkan sekitar 82% dari penyandang disabilitas tersebut berada di negara-negara berkembang dan rata-rata hidup dengan kemiskinan. Mereka juga sering menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Berdasarkan data dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, di negara berkembang jumlah anak disabilitas yang tidak bersekolah adalah 90% dan hanya terdapat 1% saja perempuan disabilitas yang bisa membaca (International Labour Organization, n.d.). Keadaan ini memperlihatkan penyandang disabilitas membutuhkan suatu wadah untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan mereka. Permasalahan mengenai isu disabilitas ini juga tampak terjadi di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai pembangunan yang merata. Banyak terdapat ketimpangan terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi dan rentan termasuk para penyandang disabilitas, mereka seringkali terisolir secara sosial dan tidak jarang menghadapi diskriminasi seperti dalam mengakses kesehatan, pekerjaan dan pendidikan. *World Health Organization (WHO)* dan Bank Dunia menyatakan anak-anak yang mengalami penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama dibandingkan yang bukan penyandang disabilitas, tingkat kesenjangan yang ada mencapai 60% (Organisasi Perburuhan Internasional, 2011, p. 3). Ini berarti ketersediaan pelayanan lebih diarahkan pada kondisi anak-anak normal dari pada menyesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Hal ini juga terjadi di Pulau Lombok salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dinas Sosial Provinsi NTB mengungkapkan peyandang disabilitas ini berjumlah sekitar 20 ribu orang bahkan sampai tiga ribu, diantaranya adalah penyandang disabilitas berat dan rata-rata berasal dari masyarakat dalam kategori miskin. Faktor kemiskinan ini menjadi salah satu penyebab mereka cacat permanen karena tidak adanya biaya untuk pengobatan (Global Fm Lombok, 2017a). Mereka juga masih kesulitan dalam mengakses infrastruktur yang belum menyesuaikan dengan kondisi disabilitas termasuk juga keterbatasan dalam mengakses pekerjaan. Dalam bidang pendidikan, pendidikan bagi anak-anak disabilitas di Provinsi NTB terbilang masih minim, salah satunya dikarenakan masih banyak sekolah umum maupun perguruan tinggi yang menolak anak-anak seperti mereka yang berkebutuhan khusus, bahkan mereka juga banyak yang belum memiliki sekolah (Global Fm Lombok, 2017b). Hal ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas. Namun, di sayangkan jumlah SLB di Pulau Lombok masih sangat terbatas (Suara NTB, 2017b). Uraian di atas menggambarkan bahwa permasalahan penyandang disabilitas bukanlah persoalan yang remeh. Bisa saja dengan terbaikannya pemenuhan hak bagi disabilitas mengakibatkan semakin menurunnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu negara. Terbaikannya pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan indeks kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara lain.

Terkait hal tersebut, permasalahan disabilitas mendorong inisiatif nasional dan internasional untuk menjamin hak-hak para disabilitas seperti dalam Peraturan Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penyediaan peluang penyandang disabilitas telah memasukkan hak asasi manusia penyandang cacat yang berpuncak pada tahun 2006 dengan di sahkannya Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas yakni *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang sudah diratifikasi oleh 164 negara termasuk Indonesia (Harahap & Bustanuddin, 2015). Ini bermakna bahwa semua aktor memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan permasalahan disabilitas, sehingga permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi juga membutuhkan peran dari banyak salah satunya peran dari Organisasi Non Pemerintah.

Dalam upaya tersebut, muncul istilah kedermawanan yang dimana kegiatannya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Praktik kedermawanan ini salah satunya ditandai dengan adanya gerakan filantropi yang lebih terorganisasikan dengan menawarkan keadilan sosial (Latief, 2017, p. 6). Salah satu lembaga filantropi internasional yang memiliki kepedulian terhadap anak penyandang disabilitas yang ada di Pulau Lombok, Provinsi NTB adalah Yayasan *LombokCare*. Yayasan ini berfokus pada pendidikan dan pelayanan kesehatan secara gratis bagi disabilitas yang tidak mampu di Pulau Lombok. Lembaga filantropi di Indonesia seperti Yayasan *LombokCare* ini diharapkan dapat berperan dalam mencapai target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Keberhasilan *SDGs* bergantung pada kemitraan global yang inklusif seperti keterlibatan organisasi filantropi. Oleh karena itu, Yayasan *LombokCare* diharapkan dapat membantu anak-anak penyandang disabilitas terutama yang kurang mampu dalam memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendukung

pembangunan daerah yang ada di Provinsi NTB itu sendiri sehingga dapat berperan mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, buku yang menjadi kajian dalam penelitian ini ialah buku yang berjudul “Politik Filantropi Islam di Indonesia Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil” karya Hilman Latief yang diterbitkan oleh Ombak pada tahun 2017 (Latief, 2017, pp. 5–36). Buku ini secara umum membahas mengenai tindakan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia melalui zakat atau sedekah. Penulis memilih tulisan ini dikarenakan tema filantropi yang diangkat sesuai dengan penelitian yang dikaji. Buku tersebut menjelaskan bahwa tradisi memberi oleh masyarakat Muslim di Indonesia dilakukan melalui kewajiban membayar zakat maupun sedekah. Praktik kedermawanan yang dilakukan tersebut dapat menopang kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat. Keterlibatan negara juga semakin menguat yang dapat dilihat dari peran nya dalam mengatur dan mengorganisasi pelaksanaan zakat. Buku ini menyebutkan bahwa terdapat tiga entitas yang menjadi aktor penting dalam pengembangan praktik filantropi Islam di Indonesia yaitu aktor yang mewakili pemerintah, masyarakat sipil dan pelaku bisnis. Pada akhir 1990-an, lembaga-lembaga keagamaan Islam mulai melirik aspek filantropi Islam sebagai salah satu alat untuk menggalang dana-dana masyarakat yang nantinya dapat membantu masyarakat kurang mampu dengan berbagai kepentingan.

Buku ini juga membahas mengenai arti penting peran organisasi masyarakat sipil, dimana salah satu upayanya adalah mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Muslim di Indonesia. Munculnya organisasi masyarakat sipil ini dikarenakan negara/pemerintah tidak mampu atau lalai dalam menyiapkan dan menerapkan program-program pembangunan. Tulisan diatas memiliki beberapa persamaan yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian penulis terutama terkait pembahasan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga filantropi dalam membantu kesejahteraan masyarakat terutama yang berasal dari kalangan masyarakat miskin dan juga memiliki program yang bersifat sustainabilitas. Kehadiran organisasi sipil masyarakat, selain pemerintah, juga memiliki peran penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Perbedaan penelitian penulis dengan literatur tersebut yaitu literatur di atas membahas tentang bagaimana perspektif filantropi Islam di Indonesia yang difokuskan pada masyarakat Muslim, sedangkan penelitian ini membahas tentang Yayasan *LombokCare* sebagai organisasi filantropi internasional yang juga memiliki peran untuk membantu kalangan masyarakat miskin khususnya anak-anak penyandang disabilitas melalui pelayanan pendidikan dan program sosial lainnya.

Kedua, penelitian yang berjudul “Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Sebagai Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Difabel Di Bidang Ekonomi Kreatif” ditulis oleh Yulia Ratna Sari, Pudjo Suharso, dan Sukidin yang dimuat dalam jurnal pendidikan ekonomi (Sari et al., 2018). Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Yogyakarta terhadap pemberdayaan kelompok difabel dalam bidang ekonomi kreatif. Yayasan ini bergerak dikarenakan ingin memperjuangkan kesetaraan, kesejahteraan serta berupaya meningkatkan kemandirian dan potensi kaum disabilitas. Penelitian ini menjelaskan

bahwa yayasan tersebut sebagai organisasi nirlaba memberikan pemberdayaan kepada kelompok difabel dibidang ekonomi kreatif yang dilakukannya melalui dua cara yakni sebagai motivator dan fasilitator. Serta membantu dalam proses produk produk-produk kreatif, pelatihan menjahit dan keterampilan bahasa Inggris.

Tulisan ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian penulis terutama dalam hal pembahasan mengenai peran dari salah satu organisasi nirlaba dalam memberdayakan penyandang disabilitas, yang ingin memperjuangkan kesetaraan, kesejahteraan dan meningkatkan potensi kaum difabel. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu terletak pada program yang dimiliki oleh masing-masing yayasan. Perbedaan lainnya penelitian diatas membahas tentang peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang Peran Yayasan *LombokCare* dalam memberdayakan anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok, Provinsi NTB.

Tinjauan selanjutnya adalah penelitian yang merupakan tulisan karya Bagus Hardianto Rahmono dengan judul "Gerakan Filantropi Pendidikan Anak (Studi Kasus: Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)" (Rahmono, 2018). Secara umum tulisan ini menjelaskan mengenai gerakan filantropi Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) sebagai salah satu yayasan non-pemerintah yang berkontribusi memberikan akses kebutuhan pendidikan kepada anak-anak kalangan menengah ke bawah. Penelitian ini menunjukkan adanya kehadiran dari Yayasan GNOTA sebagai bentuk gerakan sosial berbasis filantropi yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak miskin. Yayasan ini melakukan aksi gerakan sosial berbasis filantropi dengan cara mencari sumberdaya masyarakat untuk menjadi bagian orang tua asuh. Pengerahan sumber daya ini sebagai bagian dari pelayanan yang diberikan oleh yayasan bagi pendidikan anak miskin agar mereka tidak putus sekolah. Dalam penelitiannya Bagus Hardianto menggunakan perspektif filantropi untuk melihat bagaimana tindakan kedermawanan yang dilakukan oleh yayasan GNOTA kepada anak-anak kalangan bawah melalui gerakan filantropi yakni dengan programnya berupa donasi pendidikan untuk anak kurang mampu sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Meskipun tidak ada mengenai penyandang disabilitas yang dibahas, penelitian tersebut dipilih karena memiliki persamaan dengan tema yang akan dikaji. Pemaparan mengenai bagaimana suatu lembaga filantropi membantu anak-anak dalam bidang pendidikan yang berasal dari kalangan bawah untuk mendapat kesetaraan dengan anak-anak lainnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan pendidikannya. Beberapa hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis ialah penelitian penulis fokus pada anak-anak penyandang disabilitas yang berasal dari kalangan masyarakat miskin, sedangkan penelitian di atas pada anak-anak sekolah dasar yang juga berasal dari kalangan masyarakat miskin. Perbedaan lainnya tentu terkait lokasi penelitian, jika penelitian di atas pada Yayasan Lembaga GNOTA yang bertempat di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Maka penelitian penulis berada pada Yayasan *LombokCare* yang bertempat di Pulau Lombok, Provinsi NTB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan merujuk pada permasalahan yang diangkat dengan pengamatan secara langsung sesuai dengan realitas yang ada di lapangan berupa kata-kata tertulis dengan melibatkan pengumpulan berbagai sumber informasi dari informan (Kuntjojo, 2009, pp. 14–15). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer penulis peroleh langsung dari sumber data nya melalui observasi dengan berkunjung langsung ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak terkait sesuai dengan penelitian penulis (Sugiyono, 2013, p. 137). Data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan, artikel, data dari internet dan lain sebagainya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan berkunjung langsung ke Yayasan *LombokCare* yang menjadi lokasi sasaran penulis. Pengumpulan data juga melalui wawancara dengan Bapak Apip selaku Ketua Yayasan *LombokCare*. Selain itu juga dengan Bapak Kertanah selaku Kepala Seksi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi NTB, dan Bapak Hasbulwadi sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB dengan datang langsung ke tempat informan. Kemudian, penulis menggunakan studi pustaka dengan *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

KERANGKA PEMIKIRAN

KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)

Penelitian ini menggunakan konsep *Sustainable Development Goals*. *SDGs* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda baru pembangunan dunia bagi umat manusia, yang diterbitkan pada tahun 2015 untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia yang disetujui oleh semua anggota PBB. Selama lima belas tahun kedepan, dengan sasaran baru yang berlaku secara *universal* untuk semua negara, negara-negara akan memobilisasi usaha untuk mencapai tiga tujuan mulia 2030 yaitu mengakhiri semua bentuk kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim, dengan memastikan bahwa tidak akan ada negara yang tertinggal (*No One Left Behind*) (United Nations, n.d.).

Agenda 2030 berkomitmen untuk memberdayakan mereka yang berisiko kerentanan, termasuk penyandang disabilitas. Ini juga mempromosikan penghormatan *universal* terhadap hak asasi manusia, kesetaraan dan non diskriminasi (European Disability Forum, n.d.). Demi mewujudkan pembangunan yang inklusif terhadap disabilitas, United Nations (2015, p. 13) telah memasukkan beberapa agenda dalam *SDGs* yang ditujukan bagi para penyandang disabilitas serta akses-akses lingkungan yang sesuai dengan kondisi mereka termasuk juga kesetaraan dalam bidang pendidikan. Dalam hal pendidikan, *SDGs* memiliki beberapa target capaian terkait disabilitas yaitu pada tahun 2030 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas (SDG 2030 Indonesia, n.d.).

Tujuan-tujuan *SDGs* dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas membutuhkan dan bergantung pada aksi yang sinergi antara kemitraan

global yang inklusif, keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat sipil dan termasuk lembaga filantropi. Filantropi ini dianggap penting karena memiliki keistimewaan yang mampu mengambil resiko lebih besar juga keberpihakan dalam menyelesaikan permasalahan terutama pada isu atau masyarakat terpinggirkan (Nur Aminah, 2015). Salah satunya yang berperan cukup penting adalah organisasi filantropi seperti Yayasan *LombokCare* dengan memberikan pelayanan pendidikan dan program bantuan sosial lainnya bagi penyandang disabilitas miskin di Pulau Lombok. Untuk meningkatkan peran dan keterlibatan lembaga filantropi dalam pencapaian *SDGs* sendiri, telah diluncurkan *SDGs Philanthropy Platform* yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog internasional sebagai tujuan untuk melakukan kolaborasi antar lembaga filantropi (Filantropi Indonesia dan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BAKTI), n.d.).

KONSEP ORGANISASI FILANTROPI

Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ungkapan rasa cinta dengan maksud untuk menolongnya (Chusnan, 2007, p. 74). *Robert L. Payton*, menekankan filantropi dalam konteks kegiatan keorganisasian atau kolektif, dimana filantropi tidak diartikan sebagai kegiatan individu tetapi kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh atau melalui organisasi atau lembaga. Kegiatan ini mencakup penggalangan, pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial dari masyarakat untuk kepentingan bersama yang dapat mendorong perubahan kolektif di masyarakat terutama bagi yang kurang mampu (Saidi et al., 2006, p. 5). Demi terciptanya kesetaraan dan mendapatkan hak yang sama atau keadilan sosial yang biasanya dilakukan secara sukarela dan bersifat *non-profit*. Kegiatan filantropi tidak hanya dilakukan oleh individu saja tapi juga melalui kegiatan keorganisasian filantropi yang lebih terencana. Jika dicermati, Yayasan *LombokCare* selaras dengan konsep *NGO based on philanthropy*. Organisasi filantropi, apabila dilihat dari definisinya sendiri, adalah sebuah organisasi non pemerintah, *non profit* yang memanfaatkan donasi dan pendapatan yang disumbangkan untuk menyediakan layanan sosial yang bermanfaat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termarginalkan (Charles, n.d.).

AKTIVISME TRANSNASIONAL

Transnasionalisme muncul akibat adanya perkembangan dalam dinamika hubungan internasional yang melewati lintas batas negara. Hubungan internasional tidak lagi membingkai hubungan antar aktor negara saja tapi aktor non negara yang dianggap berpengaruh besar seperti organisasi non pemerintah termasuk juga individu. Aktivisme transnasional di dalamnya banyak membahas mengenai isu-isu yang dulu dianggap minor seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hak asasi, dan lingkungan (Soetjipto, 2018, p. 166). Konsep aktivisme transnasional pertama kali dikemukakan oleh Porta dan Marchetti dalam tulisannya pada tahun 2011 berjudul "*Transnational activism and global justice movement*." Porta dan Marchetti mendefinisikan gerakan transnasional sebagai sebuah gerakan protes terhadap masalah-masalah sosial yang melibatkan organisasi internasional dan dua atau lebih negara serta ruang lingkup yang melewati batas negara (Robertua, 2017, p. 51).

Dengan kata lain dijelaskan bahwa aktivisme transnasional sebagai sebuah pengerahan gerakan kolektif dalam meminta atau menyuarakan keadilan yang berkaitan dengan a) isu transnasional/global, b) dirumuskan oleh aktor terletak di lebih dari satu negara, dan lainnya. Para aktivis transnasional mampu menciptakan hubungan dan membentuk koalisi di antara berbagai jenis aktor yang beroperasi di tingkat yang berbeda (lokal, nasional, regional, internasional) (Caouette, 2006).

Dalam konsep aktivisme transnasional, *non government organization* (NGO) menjadi aktor utama karena posisi NGO yang aktif melakukan gerakan protes. Gerakan transnasional menjadi salah satu metode bagi NGO dalam upayanya mengusung sebuah isu. Gerakan yang bersifat lintas batas negara tersebut memungkinkan arah gerak yang lebih luas bagi aktor non negara karena usaha yang dilakukan tidak dibatasi oleh teritori tertentu. Berbagai cara dilakukan NGO untuk mencapai target termasuk di dalamnya *framing issue*, negosiasi, *lobbying*, advokasi dan kampanye menjadi strategi NGO untuk mencapaitujuannya (Soetjipto, 2018, pp. 167–169). *Non Government Organization* (NGO) menjadi salah satu aktor yang juga memiliki pengaruh besar dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial terkait isu yang terjadi dalam suatu negara. Bahkan NGO ini sering kali mampu menciptakan adanya hubungan atau kerjasama yang dilakukan dengan berbagai aktor tidak hanya pada tingkat local namun melewati lintas negara, seperti halnya Yayasan *LombokCare* sebagai salah satu NGO yang berbasis filantropi yang sudah mampu terhubung dengan organisasi yang ada di Belanda untuk bersama-sama menangani permasalahan terkait penyandang disabilitas di Pulau Lombok, Indonesia, sehingga NGO ini dikatakan penting dalam menangani permasalahan yang belum mampu diselesaikan oleh negara. Berdirinya Yayasan ini menandakan bahwa kehadirannya sebagai aktor non negara yakni organisasi filantropi internasional merupakan bentuk dari kegiatan aktivisme transnasional yang terletak di lebih satu negara dalam menjalankan programnya untuk membantu permasalahan sosial terkait penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MASALAH PENYANDANG DISABILITAS DI PULAU LOMBOK, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk ke dalam salah satu daerah yang memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Indonesia. Data dari Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memasuki urutan ke-5 dari 34 provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Indonesia (Diono et al., 2014, p. 11). Penyandang disabilitas di Pulau Lombok sering kali merasa kesulitan dalam mengakses infrastruktur terkait kondisi infastruktur yang belum ramah atau menyesuaikan dengan kondisi mereka. Selain itu, masih terdapat perusahaan di Provinsi NTB yang tidak membuka kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas (Suara NTB, 2017a). Humas Provinsi NTB mengungkapkan (2017) bahwa dalam bidang pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Provinsi NTB terbilang masih minim, salah satunya dikarenakan masih banyak sekolah umum maupun perguruan tinggi yang menolak anak-anak seperti mereka yang berkebutuhan khusus.

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan akses pendidikan dengan membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) dan mendorong tumbuhnya sekolah inklusi (Maulipaksi, 2017). Sayangnya, di Provinsi NTB sendiri SLB yang ada terbilang masih terbatas sehingga mendorong Pemerintah Provinsi NTB mendeklarasikan dirinya sebagai provinsi yang menjalankan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak termasuk anak dengan disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Bapak Kertanah, S.Sos Kepala Seksi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi NTB, menyatakan jumlah SLB yang ada di Provinsi NTB belum cukup untuk menampung tingginya jumlah penyandang disabilitas yang ada di Pulau Lombok selain itu juga sebagian dari mereka belum mendapatkan akses ke SLB karena letaknya yang jauh dari rumah dan pada umumnya berada di daerah perkotaan (Kertanah, wawancara, 9 Agustus 2019).

Bapak Kertanah mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga faktor permasalahan bagi penyandang disabilitas yang masih belum bisa terselesaikan di Pulau Lombok. Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas untuk menangani anak-anak disabilitas di Pulau Lombok. Bapak Kertanah menilai perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah untuk turun tangan memberikan pelatihan langsung kepada tenaga-tenaga pengajar atau pemuda-pemuda terutama bagi mereka yang sudah strata 1 maupun strata 2 untuk membantu menangani anak-anak penyandang disabilitas. Kedua, kondisi anak-anak disabilitas yang rata-rata berasal dari masyarakat miskin atau kurang mampu tidak memiliki biaya pengobatan sehingga menjadi cacat permanen. Ini memperlihatkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh sebuah keluarga juga berkontribusi menyebabkan terjadinya disabilitas, sehingga sangat diharapkan adanya peran dari berbagai pihak untuk sama-sama membantu keluarga-keluarga penyandang disabilitas terutama yang berasal dari masyarakat tidak mampu misalnya dengan semakin ditingkatkannya aksesibilitas di NTB dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Ketiga, sikap orangtua yang masih tertutup dan merahasiakan anak-anak atau sanak keluarga mereka yang mengalami disabilitas dari pihak luar. Para orangtua malu karena adanya anggapan buruk dari masyarakat terhadap disabilitas, terlebih jika diiringi oleh penyakit kejiwaan. Menurut Bapak Kertanah, di Pulau Lombok sendiri masih ditemukan adanya penyandang disabilitas yang terisolir, dikucilkan dan didiskriminasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Sosial turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar para penyandang disabilitas di Provinsi NTB dapat tertangani dan hidup secara layak seperti masyarakat normal lainnya. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan pendekatan pribadi atau pendekatan kekeluargaan secara langsung dari pihak instansi terkait baik bagi keluarga yang merahasiakan maupun memasung anak-anak mereka.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI MASALAH DISABILITAS DI PULAU LOMBOK

Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTB dalam menangani permasalahan mengenai penyandang disabilitas yang ada di Pulau

Lombok. Bapak Kertanah (wawancara, 9 Agustus 2019) mengungkapkan bahwa penanganan terhadap penyandang disabilitas di Provinsi NTB dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menangani disabilitas. Di Provinsi NTB sendiri, terdapat 54 lembaga disabilitas yang membantu dalam menangani penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Provinsi NTB memiliki program khusus dalam membantu menangani penyandang disabilitas, pertama yaitu program untuk sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya keluarga dari penyandang disabilitas. Program kedua yaitu UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling), untuk menjangkau lokasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan agar dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya dan mencarikan solusi terbaik. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan penting dalam memberikan pembebeasan kepada disabilitas yang dipasung oleh keluarganya.

Stakeholder lainnya yang ikut serta berperan dalam membantu penyandang disabilitas di Provinsi NTB adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Lalu Hasbulwadi, M.Pd sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, mengungkapkan upaya yang telah dilakukan dalam membantu menangani penyandang disabilitas di Provinsi NTB salah satunya dengan melakukan peningkatan perkembangan terkait pembangunan bagi penyandang disabilitas seperti misalnya pembangunan dalam bidang pendidikan dengan adanya kebijakan yang disebut dengan sekolah inklusi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Provinsi NTB juga sudah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Australia yaitu ELTA (*English Language Training Assistance*), terkait bantuan kursus bahasa inggris yang memperhitungkan di dalamnya harus ada penyandang disabilitas. Bapak Hasbulwadi mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan perhatian dalam mengembangkan ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Provinsi NTB terutama dalam bidang infrastruktur (Hasbulwadi, wawancara, 22 Agustus 2019).

Banyaknya permasalahan penyandang disabilitas di Provinsi NTB mendorong pemerintah melakukan kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak termasuk organisasi non pemerintah maupun organisasi internasional non pemerintah. Keterbukaan dan kerjasama Pemerintah dengan berbagai pihak menjadi hal yang baik dalam membantu menyelesaikan permasalahan disabilitas di Pulau Lombok. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Kertanah yakni keberadaan organisasi di Provinsi NTB penting karena mereka banyak membantu para penyandang disabilitas dalam memperoleh aksesibilitas dan mampung menampung disabilitas yang belum ditangani oleh pemerintah. Salah satu NGO yang berperan penting dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok yaitu organisasi filantropi internasional, Yayasan *LombokCare*.

LATAR BELAKANG PENDIRIAN YAYASAN LOMBOKCARE

Berawal dari kunjungan keluarga Scheurs ke Pulau Lombok dan terkesan dengan keindahannya. Selain keindahannya, kemiskinan masih terjadi, terlihat dari orang mencari makanan di tong sampah, anak-anak memohon di pinggir jalan besar, banyaknya orang miskin yang tidak mampu untuk bersekolah, anak-anak disabilitas

yang tidak memiliki kemampuan baik itu dalam berbicara, berjalan dan lain sebagainya, anak-anak disabilitas yang di diskriminasi, bahkan sering tidak diterima untuk masuk di sekolah umum. Semua hal tersebut menggerakkan hati Apip Sutardi dan istrinya Mindi Melanie Schreurs untuk mendirikan Yayasan *LombokCare* yang bertujuan untuk membantu memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara gratis (A. Sutardi, wawancara, 6 Juli 2018) (*LombokCare Foundation*, n.d.-b). Keluarga Schreurs awalnya mendirikan *Stichting* (yayasan) *LombokCare* di Belanda, tepatnya pada tahun 2008 dan bekerjasama dengan sebuah yayasan lokal untuk melaksanakan program-program di Pulau Lombok pada tahun 2009-2011. Pada tanggal 7 Juni tahun 2012, *Stichting LombokCare* Belanda memutuskan untuk mendirikan Yayasan *LombokCare* di Pulau Lombok, Indonesia (*LombokCare*, 2018, p. 3).

Yayasan *LombokCare* berfokus pada program *Readycation* yakni rehabilitasi dan edukasi untuk anak berkebutuhan khusus (fisik dan ganda) serta program bantuan sosial lainnya. Visi Yayasan *LombokCare* adalah untuk memperjuangkan hak-hak anak berkebutuhan khusus terutama yang miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya., sedangkan tujuan yayasan tersebut adalah memberikan terapi kepada anak berkebutuhan khusus (fisik), memberikan pendidikan formal dan informal, menyiapkan sarana bermain anak dan meningkatkan bakat, minat, keterampilan dan kepercayaan diri anak agar dapat mandiri (*LombokCare*, 2018, pp. 3–4).

PROGRAM YAYASAN LOMBOKCARE YANG BERPERAN DALAM MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS DI PULAU LOMBOK, PROVINSI NTB

Mengacu pada data profil Yayasan *LombokCare* (*LombokCare*, 2018, pp. 4–22), Yayasan *LombokCare* berupaya membantu melalui program pertama yaitu, Program Divisi Rehabilitasi. Pada umumnya rehabilitasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas ini berfungsi sebagai bentuk tindakan pencegahan, penyembuhan, pemulihan/pengembalian (rehabilitatif), dan pemeliharaan atau penjagaan bagi anak-anak disabilitas di Yayasan *LombokCare*. Rehabilitasi yang diberikan ini bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Program ini sudah membuktikan bahwa banyak anak-anak disabilitas di Pulau Lombok sudah mampu berjalan, berbicara, dan belajar mandiri dengan alat bantu serta mampu mengatasi rasa minder dari terapi yang diberikan. Program rehabilitasi ini terdiri dari program fisioterapi, terapi wicara, okupasiterapi, *parenting skill*, dan program *case study*.

Kemudian, program kedua yaitu Program Divisi Edukasi terdiri dari (1) Sekolah Luar Biasa Pelangi *LombokCare*, dimana program ini diperuntukkan bagi anak-anak penyandang disabilitas yang belum pernah sekolah dan yang putus sekolah dengan diberikan berbagai terapi oleh pengajar. Selanjutnya adalah (2) program *lifeskill* (keterampilan dan kemandirian) bagi penyandang disabilitas seperti diantaranya komputer, melukis, kreatif anak agar mandiri termasuk juga kreatif orangtua. Salah satu keterampilan dari anak-anak disabilitas yang berhasil menarik perhatian Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah yaitu pertunjukan film *Alma The Movie* (*Lombok Post*, 2019).

Pentingnya pendidikan bagi anak-anak disabilitas ini juga mendorong Yayasan *LombokCare* membuka program *knowledge sharing* yang bertujuan untuk (a)

memberikan advokasi dan informasi mengenai disabilitas kepada siswa dari lembaga atau institusi pendidikan domestik dan internasional, (b) memberikan kesempatan bagi siswa/mahasiswa/lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri sebagai tempat untuk melakukan kegiatan magang, (c) meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk *LombokCare*, (d) menciptakan peluang untuk mendapatkan kerjasama dan mitra di *LombokCare Foundation* (*LombokCare Foundation*, n.d.-a). Terkait program magang Bapak Apip, selaku Ketua Yayasan menjelaskan bahwa *volunteer* yang ada di Yayasan *LombokCare* ini ada yang berasal dari mahasiswa magang yang setiap tahun datang seperti dari negara Belanda.

Selanjutnya, (3) Program Divisi Sosial, bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial ketempat-tempat yang membutuhkan selain itu juga untuk menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama manusia. Divisi ini terdiri dari *home visit*, *surey* (penapatan anak penyandang disabilitas), konseling orangtua, dan *assessment* anak. Kemudian, (4) Program Divisi Logistik. Yayasan *LombokCare* juga menyediakan system kebersihan, perkebunan, dan keamanan agar anak disabilitas, orang tua dan juga karyawan dapat dengan aman dan nyaman dalam melakukan kegiatannya. Program kelima (5) adalah Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Program ini bekerjasama dengan lembaga sosial/Instansi sosial lainnya, dan dilakukan untuk orangtua penyandang disabilitas yang berada di luar Yayasan dan masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat belajar tentang anak-anak penyandang disabilitas dan cara menanganinya. Program keenam (6) adalah Program Bantuan Sosial diperuntukkan bagian anak-anak penyandang disabilitas maupun masyarakat yang mengalami keterbatasan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang memadai. Program tersebut diantaranya bantuan sosial sembako, bantuan sosial air bersih, bantuan sosial rehab bangun panti/sekolah, program bantuan sosial alat bantu bekerjasama dengan yayasan/organisasi dalam dan luar negeri ataupun sponsor perorangan agar hak-hak disabilitas dapat terpenuhi.

LombokCare Foundation merupakan donator utama Yayasan *LombokCare*. *LombokCare Foundation* yang ada di Belanda tersebut bertugas untuk melakukan *fundraising* (penggalangan dana) untuk melaksanakan program-programnya yang ada di Pulau Lombok, karena sebelum berdirinya *LombokCare* di Pulau Lombok, *LombokCare Foundation* ini sudah terlebih dahulu aktif di Belanda dengan membuat program-program yang lain. Namun, donator tersebut tidak hanya berasal dari Belanda tapi ada juga dari Australia, Kementerian Sosial, perusahaan, lembaga dan dana pribadi para donator serta donasi silang bagi orangtua anak asuh yang mampu dan ikut berkontribusi. Bantuan yang diberikan berupa materi dan non materi, terkadang melibatkan musisi untuk menghibur anak asuh dan orangtua (A. Sutardi, wawancara, 19 Agustus 2019).

PERAN YAYASAN LOMBOKCARE DALAM MEMBANTU AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI PULAU LOMBOK, PROVINSI NTB BAGI DISABILITAS

Filantropisme Dalam Agenda dan Kegiatan Yayasan LombokCare

LombokCare Foundation merupakan donator utama Yayasan *LombokCare*. *LombokCare Foundation* yang ada di Belanda tersebut bertugas untuk melakukan *fundraising* (penggalangan dana) untuk melaksanakan program-programnya yang ada

di Pulau Lombok, karena sebelum berdirinya *LombokCare* di Pulau Lombok, *LombokCare* Foundation ini sudah terlebih dahulu aktif di Belanda dengan membuat program-program yang lain. Yayasan *LombokCare*, sebagai sebuah organisasi filantropi internasional memiliki peran penting dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok, Provinsi NTB.

Dalam hal ini, Yayasan *LombokCare* berupaya memanfaatkan pendanaannya berupa donasi dan pendapatan yang disumbangkan untuk menyediakan layanan sosial yang bermanfaat, sehingga *LombokCare* ini juga memiliki peranan untuk menawarkan keadilan sosial bagi disabilitas yang tidak mampu, hal ini dilihat dari agendanya dalam menyediakan berbagai pelayanan yang diberikan melalui beberapa program diantaranya ialah program pendidikan, kesehatan, program divisi sosial, program divisi logistik, program rehabilitasi berbasis masyarakat, dan program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang ada di Pulau Lombok, Provinsi NTB secara gratis bagi mereka yang tidak mampu. Sehingga peran mereka ini sesuai dengan representasi dari sebuah organisasi filantropi yang menyatakan bahwa organisasi filantropi itu sebagai salah satu lembaga yang berperan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui kegiatan yang dilakukannya untuk membantu kualitas hidup masyarakat lombok khususnya penyandang disabilitas.

Penulis melihat bahwa kegiatan sukarela yang dilakukan oleh Yayasan *LombokCare* ini juga berperan dalam membantu kemaslahatan publik. Salah satu peran penting Yayasan *LombokCare* dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas di Provinsi NTB ialah melalui program rehabilitasi, dimana rehabilitasi ini bertujuan agar anak-anak disabilitas tersebut mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri melalui berbagai terapi yang diberikan oleh Yayasan *LombokCare*. Sementara dalam bidang pendidikan, program pendidikan Yayasan *LombokCare* ini memberikan kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas yang belum pernah sekolah dan yang putus sekolah untuk memperoleh pendidikannya di Yayasan *LombokCare* melalui program SLB Pelangi *LombokCare* dan *program lifeskill* (keterampilan dan kemandirian) secara gratis bagi mereka yang miskin dan tidak mampu. Adanya program rehabilitasi dan pendidikan ini setidaknya dapat memenuhi hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus untuk meraih pendidikan dan perawatan kesehatan seperti anak pada umumnya.

Yayasan *LombokCare* sebagai organisasi filantropi juga berperan dalam menawarkan bentuk-bentuk aktifitas karitatif sampai bentuk-bentuk kegiatan yang menawarkan tentang keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan *LombokCare* yang berupaya menawarkan aktifitasnya melalui pemberian bantuan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan seperti memberi makan, pakaian sesuai dengan apa yang dilakukan melalui pengalaman masa kecilnya hingga melaksanakan suatu program yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama atau keadilan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas, yang dapat dilihat dari ketersediaannya membuka berbagai program pelayanan bagi disabilitas dengan target utamanya ialah anak-anak disabilitas yang miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan sebuah keadilan yang setara dengan non disabilitas.

Tujuan dari kegiatan filantropi seperti Yayasan *LombokCare* ini dapat dimaknai sebagai suatu hal yang dapat menciptakan kebaikan atau kesejahteraan bersama, dan

dampak yang diharapkan dalam kegiatan filantropi pada pengertian 'kerelawanan' dan 'kedermawanan' ialah terciptanya perubahan kolektif dari sebuah komunitas, sehingga peran dari organisasi filantropi ini sangat penting, bahkan salah satu faktor pendorong tercapainya proses pembangunan berkelanjutan ialah keterlibatan dari organisasi filantropi seperti Yayasan *LombokCare*, hal ini dikarenakan upaya nya dalam membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat terkait penyandang disabilitas melalui agendanya dalam berkontribusi memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan program sosial lainnya secara gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Berbeda dengan NGO lokal lainnya, organisasi filantropi seperti Yayasan *LombokCare* ini mampu merepresentasikan aksi-aksi kolektif dari masyarakat sebagai suatu hal yang penting untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat seperti mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan publik, dan keadilan sosial.

Organisasi filantropi ini dapat berkontribusi dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, terkhusus lagi Yayasan *LombokCare* ini ialah organisasi filantropi internasional yang memiliki jaringan tidak hanya pada tingkat lokal saja, tapi sudah melewati lintas batas negara yang dapat memudahkan mereka melakukan kolaborasi dengan NGO lainnya di negara lain, *advocacy*, dapat memudahkan mereka dalam hal pendanaan, sehingga mereka tidak hanya berputar di dalam negeri saja. Jaringan aktivitas yang dimiliki Yayasan *LombokCare* dalam upaya menggalangkan dana di Belanda membuat yayasan ini efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, tidak hanya itu mereka juga berkaitan dengan bantuan internasional yang berupaya membantu masalah penyandang disabilitas, termasuk juga dalam sukarelawan global inilah yang membedakan mereka dengan NGO lokal lainnya.

AKTIVISME TRANSNASIONAL DALAM KEGIATAN YAYASAN *LOMBOKCARE*

Jika dilihat dari teori aktivisme transnasional, Yayasan *LombokCare* dalam berperan menangani masalah anak-anak disabilitas di Pulau Lombok tergolong kedalam suatu aktivisme transnasional. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Porta dan Marchett, dalam hal ini Yayasan *LombokCare* merupakan salah satu NGO dari Belanda yang berperan melakukan gerakan melalui berbagai program terkait masalah sosial seperti permasalahan mengenai anak-anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok dalam menyuarakan keadilan untuk membela hak dan memenuhi hak-hak bagi anak-anak penyandang disabilitas terutama yang berasal dari masyarakat miskin, yang dilakukannya melalui gerakan-gerakan atau program-program Rehabilitasi dan Edukasi. Sehingga mendorong keterlibatan dari berbagai aktor seperti *LombokCare* Foundation Belanda, yang mana masalah penyandang disabilitas ini termasuk ke dalam suatu isu transnasional yang dilihat oleh NGO tersebut harus diatasi di Pulau Lombok. *LombokCare* Foundation Belanda inipun jika dilihat termasuk dalam NGO yang merupakan aktor transnasional yang bekerja di lebih dari satu negara dengan menjalankan programnya di Indonesia tepatnya di Pulau Lombok.

Hadirnya Yayasan *LombokCare* di Pulau Lombok dengan membawa program-program seperti Rehabilitasi dan Edukasi ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh *LombokCare* untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya menangani isu penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan banyak dari penyandang disabilitas tersebut yang masih didiskriminasi di masyarakat, dianggap sebagai aib

keluarga, belum memperoleh kesehatan dan pendidikan terutama dari masyarakat tidak mampu padahal mereka juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat normal lainnya agar mendapat kehidupan yang lebih berkualitas. Bisa saja dengan terbaikannya hak-hak mereka tidak menutup kemungkinan kualitas Sumber daya manusia yang ada di suatu negara dapat tertinggal dengan negara lainnya. Selain itu aktivisme transnasional Yayasan *LombokCare* dapat dilihat dari perannya untuk membantu anak-anak disabilitas di Pulau Lombok melalui interaksi transnasional yang dilakukan seperti *LombokCare* Foundation Belanda sebagai organisasi filantropi yang merupakan bagian dari NGO bekerjasama dengan yayasan lokal yang ada di Lombok yakni untuk menjalankan program-programnya.

Dalam hal ini, *LombokCare* Foundation Belanda berupaya membantu organisasi lokal Yayasan *LombokCare* dengan melakukan *fundraising* (penggalangan dana) di Belanda yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang ada di Pulau Lombok. Selain itu banyak juga mahasiswa magang, maupun kunjungan yang berasal dari luar negeri untuk ikut berpartisipasi di *LombokCare* baik untuk sharing pengetahuan, bahasa dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan ini tentu akan memberi banyak manfaat untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui program-program yang dijalankan oleh *LombokCare*, sehingga melalui kunjungan maupun kegiatan magang ini mereka dapat saling berbagi informasi baik antara pengajar local maupun volunteer asing tersebut (Apip Sutardi, wawancara 19 Agustus 2019). Peran Yayasan *LombokCare* dapat dilihat tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga berupaya membantu dari tingkat internasional juga.

NGO menjadi penting dalam ekonomi politik internasional karena kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Yayasan *LombokCare* dalam membantu anak-anak disabilitas di Pulau Lombok terus berupaya mengumpulkan berbagai pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti dalam wawancara dengan penulis, Apip Sutardi (19 Agustus 2019) mengatakan, *LombokCare* Foundation yang ada di Belanda berupaya mengumpulkan dana dari kunjungannya ke sekolah-sekolah maupun komunitas lain sehingga berhasil mengumpulkan EUR 1.000.000.

Berbagai pendanaan yang diberikan oleh Yayasan *LombokCare* ini menandakan bahwa yayasan tersebut telah mampu berkontribusi untuk mendanai dalam pelaksanaan program yang dijalankan bagi penyandang disabilitas di Negara Indonesia tepatnya di Pulau Lombok. Tentu bagi institusi negara dan masyarakat local, program-program yang ada melalui bantuan pendanaan ini akan sangat berguna bagi mereka. Dalam hal ini, tidak hanya negara saja yang mampu memberikan berbagai pendanaan maupun bantuan lainnya bagi masyarakat miskin namun kehadiran NGO ini dapat membantu negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan domestik yang tidak dapat diselesaikan oleh negaranya.

Apip Sutardi juga mengungkapkan untuk mendukung program-program yang ada di Yayasan *LombokCare* khususnya melalui penggalangan dana, *LombokCare* Foundation yang ada di Belanda juga berupaya melakukan advokasi yaitu dengan berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di Belanda termasuk juga ke komunitas-komunitas yang ada disana dengan memperlihatkan program-program yang telah dilaksanakan oleh organisasi lokal Yayasan *LombokCare* di Indonesia. Misalnya *fundraising* (penggalangan dana), *LombokCare* Foundation bekerjasama dengan salah satu sekolah SD atau TK di Belanda dengan menampilkan program-program yang ada

di Yayasan *LombokCare* Indonesia. Selain itu juga mereka melakukan kegiatan olahraga dengan mengelilingi kompleks sekolah yang ada di Belanda, dimana dalam satu kegiatan tersebut biasanya terdapat 10 Sekolah yang memberikan sumbangan dengan total sebesar EUR 1.000.000. Penggalangan dana juga dilakukan dengan mengunjungi komunitas-komunitas misalnya mengundang mereka makan malam sekalian juga untuk memperlihatkan program-program yang dijalankan oleh Yayasan *LombokCare* yang ada di Lombok, Indonesia.

Berbagai peran yang dilakukan oleh Yayasan *LombokCare* untuk membantu anak-anak disabilitas menjadikan *LombokCare* sebagai salah satu lembaga yang berpengaruh terhadap dikeluarkannya Perda (Peraturan Daerah) mengenai Penyandang Disabilitas di Provinsi NTB, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi NTB, Bapak Kertanah. Berbagai kegiatan dan program yang dilakukan *LombokCare* juga telah berpengaruh pada perubahan stigma masyarakat dan orangtua yang sudah mulai peduli terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan bahwa sebelumnya anak-anak tersebut dianggap sebagai aib keluarga, namun perlahan sudah banyak yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka (A. Sutardi, wawancara, 19 Agustus 2019).

SDGS PHILANTHROPY PLATFORM

Untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan oleh *SDGs* salah satunya harus mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat termarginalkan seperti penyandang disabilitas. Hadirnya Yayasan *LombokCare* sebagai sebuah organisasi filantropi internasional juga telah memberikan perhatian pada permasalahan sosial di masyarakat salah satunya terkait penyandang disabilitas melalui ketersediaannya memberikan berbagai pelayanan seperti rehabilitasi, pendidikan, bantuan sosial maupun rehabilitasi berbasis masyarakat. Sasaran utama Yayasan *LombokCare* ialah anak-anak disabilitas yang termasuk dalam kategori miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan secara gratis di *LombokCare*, secara tidak langsung Yayasan ini telah berupaya memberikan keadilan sosial bagi disabilitas tersebut termasuk juga kesetaraan dalam memperoleh hak-haknya sama dengan non disabilitas lainnya dan yang paling penting mereka mampu memenuhi kebutuhan disabilitas yang selama ini menjadi permasalahan di Pulau Lombok, sehingga Yayasan *LombokCare* dalam melaksanakan programnya yang berkelanjutan ini terlihat telah mempertimbangkan dimensi sosial di masyarakat.

Program pelayanan yang dijalankannya tidak hanya bermanfaat bagi anak disabilitas saja tapi juga bagi masyarakat sekitar yang tidak mampu. Dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs*, Pemerintah Provinsi NTB melalui Bappeda telah membuat *Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs* guna menjalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *SDGs* di Provinsi NTB. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah tujuan ke-4 *SDGs*, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua termasuk penyandang disabilitas pada tahun 2030 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, 2019, p. 171).

Pada kenyataannya, sebagian anak-anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok masih terbatas dalam mengakses pendidikan. Melihat dari keprihatinan tersebut, maka dibutuhkan aksi atau sinergitas antara pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, karena salah satu keberhasilan *SDGs* bergantung pada kemitraan global yang inklusif termasuk juga peran dari organisasi filantropi seperti Yayasan *LombokCare* yang ada di Pulau Lombok, Provinsi NTB. Peran mereka ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung program pemerintah NTB salah satunya terkait Tujuan ke-4 *SDGs* mengenai pendidikan melalui berbagai program yang dijalankannya secara gratis terutama bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *SDGs Philanthropy Platform* ini merupakan suatu bentuk dukungan atau inisiatif untuk mencapai tujuan *SDGs* yang dilakukan oleh lembaga filantropi dengan berkolaborasi bersama lembaga filantropi atau *stakeholder* lainnya dengan memfokuskan program mereka pada tujuan *SDGs*. Adanya inisiatif kemitraan dari lembaga filantropi ini menjadi penting hal ini dikarenakan tidak hanya memberikan manfaat bagi pencapaian *SDGs* saja tapi juga pada lembaga filantropi itu sendiri di mana mereka dapat mempromosikan program-program dan inisiatifnya ke level nasional dan global, selain itu mereka juga dapat memperluas jaringan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga filantropi baik di tingkat nasional maupun global. Mereka juga nantinya mampu mensinergikan program dengan agenda organisasi dengan agenda pembangunan nasional dan global.

Hadirnya *SDGs Philanthropy Platform* ini berupaya mendukung organisasi filantropi untuk terlibat dalam proses pembangunan berkelanjutan. Selain itu, bagaimana suatu lembaga filantropi membangun kemitraan dengan *stakeholder* lainnya yang tidak hanya berputar di tingkat nasional, tapi sudah mampu mengglobal untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut penulis, Yayasan *LombokCare* dapat menjadi salah satu lembaga filantropi yang berkontribusi untuk mendukung pencapaian tujuan *SDGs* dengan berkolaborasi bersama organisasi atau lembaga filantropi lainnya seperti yang sudah dicanangkan oleh *SDGs Philanthropy Platform*.

Jika melihat program-program yang dijalankan Yayasan *LombokCare*, maka yayasan ini terlihat mampu untuk ikut berkontribusi dimana program-program yang dijalankannya sesuai dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti beberapa diantaranya terkait bidang pendidikan yakni dengan menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga ditujukan secara khusus kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin dengan bantuan program sosial lainnya, seperti penyediaan air bersih bagi keluarga anak binaan *LombokCare* dan masyarakat atau daerah lainnya yang membutuhkan. Jika sudah ada sinergi atau kemitraan yang kuat, maka tidak menutup kemungkinan nantinya program mereka dapat menjadi agenda pembangunan nasional maupun global sehingga nantinya dapat mendukung pencapaian *SDGs* yang diharapkan.

Jika dilihat peran Yayasan *LombokCare* sebagai sebuah organisasi filantropi terlihat telah mampu berkontribusi dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilihat dari tindakan kedermawanan yang dilakukannya melalui berbagai program yang diberikannya secara gratis bagi penyandang disabilitas yang miskin dan tidak mampu, sehingga sebagai sebuah organisasi filantropi *LombokCare*

telah mampu berupaya menyelesaikan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat seperti mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan bagi disabilitas, dan keadilan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya sesuai dengan target tujuan yang ingin dicapai oleh *SDGs* agar seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan seperti yang ada pada prinsip *SDGs No One Left Behind* yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi semua dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal.

Yayasan *LombokCare*, melalui agendanya dalam menyediakan berbagai program pelayanan bagi disabilitas, sebagai organisasi telah mampu mendukung pembangunan berkelanjutan daerah di Provinsi NTB. Hal ini dilihat dari jaringannya yang tidak hanya bersifat lokal saja tapi sudah mampu melewati lintas batas negara, sehingga dengan aktivitas transnasional yang mereka lakukan akan mampu efektif dalam melakukan kegiatannya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan membantu permasalahan masyarakat terkait anak disabilitas di Provinsi NTB melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan dan program sosial lainnya. Bahkan adanya kegiatan transnasional ini telah mampu memudahkan mereka dalam memperoleh pendanaan yang tidak hanya berasal dari dalam negeri saja tapi juga di negara Belanda yang nantinya dapat membantu mereka dalam meningkatkan kualitas kinerja mereka untuk membantu kesejahteraan anak-anak disabilitas di Pulau Lombok, Provinsi NTB.

Apabila terjalinnya kemitraan yang lebih luas, diharapkan nantinya program-program mereka dapat menjadi agenda pembangunan nasional maupun global untuk dapat mendukung pencapaian *SDGs* yang diharapkan terutama dalam membantu menangani isu disabilitas, sehingga mereka mampu meningkatkan peran dan keterlibatannya sebagai sebuah lembaga filantropi dalam mendukung tercapainya *SDGs* sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh *SDGs Philanthropy Platform*. Selain peran dari sebuah organisasi filantropi, yang terpenting dalam platform ini juga ialah bagaimana kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam merangkul organisasi filantropi untuk bersama mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada kenyataannya di Pulau Lombok, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bappeda Provinsi NTB belum merangkul organisasi filantropi seperti Yayasan *LombokCare*, bahkan belum mengetahui terkait adanya *Platform* ini (Hasbulwadi, wawancara, 22 Agustus 2019).

Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pusat dan daerah padahal dari segi konsep *SDGs Philanthropy Platform* ini akan sangat mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Hadirnya organisasi filantropi seperti Yayasan *LombokCare* memiliki potensi dan kontribusi dalam membantu program pemerintah seperti dalam bidang pendidikan untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Jika terjalin kemitraan antara keduanya, diharapkan permasalahan mengenai penyandang disabilitas dapat dituntaskan dengan baik, sehingga hadirnya *SDGs Philanthropy Platform* memperlihatkan bahwa keterlibatan dan kontribusi dari sebuah organisasi filantropi itu penting untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Yayasan *LombokCare* sebagai salah satu organisasi filantropi internasional memiliki peran penting dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok, Provinsi NTB. Masyarakat miskin secara gratis dibantu melalui berbagai program seperti program divisi rehabilitasi, program edukasi, program divisi sosial, program divisi logistik, program rehabilitasi berbasis masyarakat, dan program bantuan sosial, yang bersifat non profit dan dilakukannya secara sukarela. Untuk membantu Yayasan *LombokCare* dalam menangani penyandang disabilitas di Pulau Lombok.

Yayasan *LombokCare* juga bekerjasama dengan *LombokCareFoundation* Belanda sebagai donatur utama yang bertugas untuk melakukan Penggalangan dana di Belanda untuk melaksanakan program-programnya yang ada di Indonesia (Pulau Lombok). Hal ini juga sebagai bentuk aktivisme transnasional yang dilakukan Yayasan *LombokCare* dalam membantu anak-anak disabilitas di Pulau Lombok, sehingga peran yayasan *LombokCare* ini tidak hanya bersifat lokal saja namun juga di dukung oleh jejaring organisasi yang bersifat lintas batas negara. Yayasan *LombokCare* dalam membantu permasalahan disabilitas di Pulau Lombok dapat dikatakan telah mampu berperan cukup baik melalui program rehabilitasi dan edukasi juga berbagai kegiatan lainnya untuk membantu memenuhi hak-hak anak disabilitas di Pulau Lombok.

Hadirnya Yayasan *LombokCare* ini diharapkan dapat membantu pembangunan di Provinsi NTB untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*). Pemerintah Provinsi NTB diharapkan semakin meningkatkan kinerjanya untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas di Provinsi NTB terutama bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, perlu adanya peningkatan sinergitas antar berbagai *stakeholder* dalam membantu menangani disabilitas yang ada di Pulau Lombok

Akhirnya tulisan ini dapat memperlihatkan bahwa isu dalam hubungan internasional tidak hanya menyangkut mengenai isu perang-damai saja tapi juga sudah mempengaruhi terhadap isu permasalahan sosial kepada tatanan masyarakat kecil. Contohnya, isu mengenai penyandang disabilitas di Pulau Lombok yang telah menjadi isu global yang perlu mendapat perhatian dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan disabilitas sudah menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Anak-anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok menerima manfaat yang besar dengan kehadiran Yayasan *LombokCare* ini terutama bagi mereka yang berasal dari masyarakat tidak mampu. Kehadiran Yayasan *LombokCare* di Pulau Lombok ini tidak hanya dilihat sebagai aktor yang hadir untuk menyelesaikan isu disabilitas, tetapi memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kemajuan pembangunan dan kemajuan masyarakat, khususnya anak-anak disabilitas di Pulau Lombok. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya dapat berkontribusi untuk mendukung kemajuan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pentingnya *SDGs* ini dapat menjadi tolak ukur apakah kesejahteraan masyarakat atau negara telah berhasil dicapai berdasarkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lainnya.

REFERENSI

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB. (2019). *RAD TPB/SDGs*.
- Biro Humas Protokol Nusa Tenggara Barat. (2017). *TGB: Mari Sayangi Anak-Anak Disabilitas*. <http://birohumasprotokol.ntbprov.go.id/berita-1046-tgb-mari-sayangi-anakanak-disabilitas.html>
- Caouette, D. (2006). *Thinking And Nurturing Transnational Activism In Southeast Asia*. Institut Gouvernance. <http://www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-49.html>
- Charles, T. (n.d.). *The Meaning of Philanthropic Organizations*. Small Business - Chron. <https://smallbusiness.chron.com/meaning-philanthropic-organizations-4779.html>
- Chusnan, J. (2007). Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(1).
- Diono, A., Mujaddid, Prasetyo, F. A., & Budijanto, D. (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*. Kementerian Kesehatan RI.
- European Disability Forum. (n.d.). *How Do The SDGs Support The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities?* <http://www.edf-feph.org/how-do-sdgs-support-convention-rights-persons-disabilities>
- Filantropi Indonesia dan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BAKTI). (n.d.). *Filantropi Indonesia, Kerangka Acuan (TOR) Philanthropy Learning Forum on SDGs, SDGs Sebagai Tools PeningkatanKapasitas dan PengembanganKemitraan*. Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BAKTI). [http://bakti.or.id/sites/default/files/TOR Philanthropy Learning Forum On SDGs Makassar.pdf](http://bakti.or.id/sites/default/files/TOR%20Philanthropy%20Learning%20Forum%20On%20SDGs%20Makassar.pdf)
- Global Fm Lombok. (2017a). 'Sebagian Penyandang Disabilitas Di NTB Karena Kemiskinan'. <http://globalfmlombok.com/read/2017/11/02/sebagian-penyandang-disabilitas-di-ntb-karena-kemiskinan.html>
- Global Fm Lombok. (2017b). 'Banyak Daerah Kantong Penyandang Disabilitas Belum Miliki Sekolah.' <http://globalfmlombok.com/read/2017/05/03/banyak-daerah-kantong-penyandang-disabilitas-belum-miliki-sekolah.html>
- Harahap, R. R., & Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, 8(1).
- International Labour Organization. (n.d.). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Universitas Nusantara PGRI.
- Latief, H. (2017). *Politik Filantropi Islam Di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*. Penerbit Ombak.
- Lombok Post. (2019, July 26). *Minta Gubernur Beri Dukungan*.

- LombokCare. (2018). *Data Profil Yayasan Lombok Care*.
- LombokCare Foundation. (n.d.-a). *Program: Knowledge Sharing*.
<https://www.lombokcare.com/id/projects-id/readycation-id/rehabilitation-id/occupational-therapy-id.html>
- LombokCare Foundation. (n.d.-b). *Tentang LombokCare*.
<http://www.lombokcare.com/id/lombokcare-id/about-lombokcare-id.html>
- Maulipaksi, D. (2017). *Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>
- Nur Aminah, A. (2015). *Begini Peran Unik Filantropi Untuk Pencapaian SDGs*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/19/ny20hy384-begini-peran-unik-filantropi-untuk-pencapaian-sdgs>
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2011). *Fakta Tentang Penyandang Disabilitas dan Pekerja Anak*. Organisasi Perburuhan Internasional.
- Radiani, A. W. (2018). *Kolaborasi LSM Lokal dan LSM Internasional dalam Advokasi Kaum Difabel di Yogyakarta (Studi Kasus Center For Improving Qualified Activity in Live of People With Disabilities (CIQAL))* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18868>
- Rahmono, B. H. (2018). *Gerakan Filantropi Pendidikan Anak (studi Kasus : Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Robertua, V. (2017). Krisis Legitimasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VII(1).
- Saidi, Z., Abidin, H., & Fuad, M. (2006). *Kedermawanan untuk Keadilan Sosial*. Piramedia.
- Sari, Y. R., Suharso, P., & Sukidin. (2018). Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Sebagai Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Difabel Di Bidang Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1).
- SDG 2030 Indonesia. (n.d.). *Tujuan 04*. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/12-tujuan-empat>
- Soetjipto, A. (2018). *Transnasionalisme: Peran Aktor Non Negara dalam Hubungan Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suara NTB. (2017a). *Jumlah SLB di NTB*.
<https://www.suarantb.com/headline/2017/07/242867/Terbatas,Jumlah.SLB.di.NTB/>
- Suara NTB. (2017b). *Penyandang Disabilitas "Dianaktirikan" Perusahaan*.
<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2017/10/246056/Penyandang.Disabilitas.Dianaktirikan.Perusahaan/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations. (n.d.). *The Sustainable Development Agenda: What Is Sustainable*

Development? <http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>

United Nations. (2015). *Global Status Report On Disability And Development Prototype 2015*.